

# **KONSEP UPAH TENAGA KERJA MENURUT PERSPEKTIF AFZALUR RAHMAN**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Tugas Akhir Kuliah Dan Untuk Memenuhi Syarat  
Sarjana Ekonomi Islam  
(S.E.I)



**OLEH**

NENI FITRI YANA  
NIM. 10625003945

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU  
R I A U  
2010**

## **ABSTRAK**

Skripsi yang berjudul "**KONSEP UPAH BURUH MENURUT PERSPEKTIF AFZALUR RAHMAN**", ditulis dengan latar belakang bahwa Upah merupakan sesuatu yang penting dan berpengaruh luas sehingga seluruh masyarakat dapat dipengaruhi olehnya bahkan upah boleh dikatakan urat nadi buruh didalam perekonomian. Upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya atas pekerjaan yang dilakukan.

Suatu problem yang amat besar, jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup buruh serta keluarganya, bahkan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap seluruh komunitasnya.

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep upah buruh menurut perspektif Afzalur Rahman dan faktor-faktor timbulnya perbedaan upah menurut Afzalur Rahman. Sedangkan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep upah buruh menurut perspektif Afzalur Rahman dan faktor-faktor timbulnya perbedaan upah menurut Afzalur Rahman.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sebagai data primer tulisan ini adalah karya Afzalur Rahman tentang upah yaitu buku Muhammad Sebagai Seorang Pedagang dan Dotrin Ekonomi Islam jilid ke-1. Penulis juga lengkapi dengan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan upah. Adapun metode pembahasan yang penulis pakai untuk penelitian ini adalah metode deskriptif, deduktif, komperatif. Latar belakang penulis mengambil judul ini yaitu karena ingin mengetahui konsep upah buruh menurut perspektif Afzalur Rahman dan tujauan Ekonomi Islam terhadap upah buruh.

Setelah penulis menelaah pendapat Afzalur Rahman tentang upah, penulis melihat bahwa konsep upah mengacu pada prinsip keadilan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah.

Dari pendapat Afzalur Rahman ini dapat dipahami keadilan dalam upah adalah bahwa dalam penetapan upah haruslah tanpa tekanan dari pihak manapun juga, dan di setujui oleh para pekerja dan majikan, sehingga terciptalah hubungan yang baik antara pekerja dan majikan.

Dan upah dibedakan berdasarkan dari pendidikan dan keahlian yang dimiliki, semakin tinggi keahlian yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggilah kedudukan yang akan diterima dan semakin besar pula lah upah yang akan kita terima dari hasil pekerjaan tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Pokok Permasalahan.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II BIOGRAFI AFZALUR RAHMAN.....</b>	<b>11</b>
A. Sekilas Tentang Afzalur Rahman.....	11
B. Karya-karya Afzalur Rahman.....	15
<b>BAB III TIJAUAN UMUM TENTANG UPAH.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Upah.....	19
B. Masalah Dalam Upah.....	25
C. Sistem Pembayaran Upah.....	27
D. Dasar Hukum Upah.....	29
E. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Upah.....	33

<b>BAB IV KONSEP UPAH BURUH MENURUT PERSPEKTIF AFZALUR RAHMAN.....</b>	<b>38</b>
A. Konsep Upah Menurut Afzalur Rahman.....	38
1. Adanya Tingkat Upah.....	42
2. Tingkat Upah Minimum.....	43
3. Tingginya Upah.....	44
4. Tingkat Upah Sebenarnya.....	45
B. Faktor-faktor Terjadinya Perbedaan Upah Menurut Afzalur Rahman.....	46
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Hukum Islam mengatur dua macam bentuk hubungan yakni hubungan manusia dengan allah dan hubungan manusia dengan manusia. Khususnya hubungan sesama tidak terlepas dari pada interaksi, ini terjadi untuk menjaga kelangsungan kehidupan sosial atau keseimbangan hidup bermasyarakat dan beragama.

Tuntutan hidup mengharuskan agar setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan karena sudah merupakan fitrah bagi manusia untuk dapat mewujudkan segala keinginan dan kebutuhan hidupnya.

Pada dasarnya setiap manusia dari setiap aktifitasnya baik yang bersifat duniawi maupun ukhrowi tidak terlepas dari tujuan dari apa yang akan ia peroleh setelah aktifitas tersebut, dan dengan berbagai macam perbedaan sudut pandang dari manusia itu sendiri terhadap asensi dari apa yang ia peroleh maka tidak jarang dan sangat tidak menutup kemungkinan proses untuk menuju pada tujuan pun bermacam-macam, seperti dalam aktifitas sosial-ekonomi.

Akan tetapi Islam merupakan sebuah agama yang Rahmat Lil-Alamin mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia, sehingga norma-norma yang di perlakukan Islam dapat memberikan solusi sebuah keadilan dan kejujuran dalam

<sup>1</sup> Departemen Agama. RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ( Semarang : CV. Toha Putra, 1989 ), h. 57

perintah dan peraturan kerja yang ditetapkan oleh suatu perusahaan dengan imbalan upah yang diterima oleh buruh<sup>2</sup>.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Tenaga kerja, yang dimaksud tenaga kerja ialah tiap-tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang-barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, jadi di sini terkandung arti yang luas. Mereka yang telah bekerja pada instansi-instansi Pemerintah terikat oleh Undang-undang Kepegawaian, sedang mereka yang telah bekerja pada perusahaan-perusahaan terikat atau dilindungi undang-undang perburuhan atau lazim disebut hukum perburuhan. Undang-undang perburuhan atau hukum perburuhan ini berlaku di setiap perusahaan atau usaha yang menampung atau memperkerjakan tenaga kerja<sup>3</sup>.

Masalah-masalah perburuhan itu lahir dari acuan yang menjadi dasar sistem kapitalis, yaitu kebebasan kepemilikan, kebebasan berusaha, dan menjadikan tingkat hidup yang paling minim sebagai dasar dalam menentukan upah.

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang akan di embannya. Jadi upah yang di terima sesuai dengan apa pekerjaan yang dilakukan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pekerja<sup>4</sup>.

Menurut M. Umar Chapra, Nilai-nilai islam menghendaki para majikan memperlakukan buruhnya seperti anggota keluarganya sendiri. Idealnya tingkat

---

<sup>2</sup> Abdurrahman Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, ( Al-Izzah, 2001), h. 153.

<sup>3</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 15-16

<sup>4</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah Sebuah Kajian Histori dan kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 113



upah riil dalam masyarakat muslim, paling tidak memungkinkan para karyawan dapat memenuhi semua kebutuhan pokoknya dan para anggota keluarganya. Sangat kontras dengan hal ini adalah, upah riil di mayoritas negara-negara sangat rendah meskipun para buruh itu sudah bekerja antara 10 sampai 14 jam mereka tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan keluarganya<sup>5</sup>.

M. Abdul Mannan mengemukakan bahwa upah adalah penghasilan tenaga kerja, upah dapat dipandang dari dua segi yaitu moneter dan bukan moneter. Jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama suatu jangka waktu, katakanlah sebulan, seminggu, atau sehari, dan itu mengaju pada upah nominal tenaga kerja.

Upah sesungguhnya dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang boleh dikatakan jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya. Adapun teori upah yang pada umumnya diterima adalah teori produk Marjinal sekalipun telah banyak mendapat kecaman, sebagaimana kita ketahui diantara semua komoditi tenaga kerjalah yang paling tidak tahan lama, sebaliknya majikan sendiri berada dalam posisi yang menguntungkan.

Seperti halnya masing-masing konsumen atau majikan, memberi upah buruh yang akan bernilai sama dengan hasil kerja marjinal dengan tarif upah yang berlaku. Pengisapan terhadap buruh oleh para majikan dilarang oleh Islam<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup>M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), h. 254

<sup>6</sup> M. Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, ( Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), h. 116

Penulis percaya jika para pekerja dan majikan didasari oleh nilai-nilai islam, larangan terhadap pemogokan dan ditutupnya tempat-tempat kerja menjadi tidak perlu. Sekarang ini persoalan pokok yang dihadapi bagaimana menanamkan nilai-nilai kehidupan Islam dalam hubungan antara buruh dan majikan<sup>7</sup>.

Afzalur Rahman mengemukakan bahwa amat menyedihkan apabila terdapat pihak birokrasi Islam yang membenci golongan buruh. Rasulullah SAW sendiri memuliakan pekerjaan buruh dan Al-Qur'an memerintahkan Rasul dan umatnya supaya bekerja keras dalam menjalani hidup. Oleh karena itu masalah upah demikian penting dan berpengaruh luas sehingga seluruh masyarakat dapat dipengaruhi olehnya<sup>8</sup>.

Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar maka tidak hanya mempengaruhi daya beli dan tarap hidup bagi parah buruh serta keluarganya, bahkan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap seluruh komunitasnya, sebab mereka mengkonsumsi sebagian besar produk nasional.

Upah ditetapkan berdasarkan aturan dan Hukum Islam, Islam menawarkan solusi yang sangat tepat, baik masalah upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan pekerja maupun majikan. Parah buruh mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar hak-hak majikannya yang sah.

Sedangkan majikan tidak diperbolehkan belaku sewenang-wenang terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan bagian hak pekerja yang sah, sementara para pekerja itu juga tidak diberi seluruh kewenangan sehingga tidak mengurangi hak yang sah dari majikannya. Upah ditetapkan dengan suatu

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 117

<sup>8</sup> Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, ( Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1997 ), h. 295

cara yang paling layak tanpa tekanan yang tidak pantas dari pihak manapun, sehingga masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa besikap zalim terhadap yang lainnya<sup>9</sup>.

Didalam hubungan kerja kewajiban utama seorang majikan membayar upah kepada pekerjanya secara tepat waktu. Oleh karena itu bagi masalah upah buruh merupakan bagian yang penting bagi seorang buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dari pembahasan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana yang dikemukakan oleh pakar (Ekonom) ekonomi Islam secara mendalam seperti apa "KONSEP UPAH TENAGA KERJA MENURUT PERSPEKTIF AFZALUR RAHMAN"

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h.296

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan untuk menghindari kesimpang-siuran dan mencapai sasaran dalam penelitian penulis memfokuskan kajiannya kepada masalah bagaimana Konsep Upah Tenaga Kerja Menurut Perspektif Afzalur Rahman.

## **C. Pokok Permasalahah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis mencoba merumuskan suatu perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana konsep upah tenaga kerja menurut perspektif Afzalur Rahman?
2. Faktor-Faktor timbulnya perbedaan upah menurut Afzalur Rahman?

## **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **A. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep upah tenaga kerja menurut perspektif Afzalur Rahman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor timbulnya perbedaan upah menurut Afzalur Rahman.

### **B. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk menambah dan memperdalam khazanah pengetahuan penulis tentang Konsep Upah Tenaga Kerja Menurut Perspektif Afzalur Rahman

2. Dapat dijadikan pedoman dan bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi penulis untuk yang akan datang.
3. Untuk mengembangkan ilmu dan potensi yang ada pada diri penulis dalam karya tulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (S1) di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### **E. Metode Penelitian**

Demi terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang yaitu menyangkut metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan study kepustakaan (*library research*) dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan.

#### **2. Sumber Data**

Dalam memperoleh data penulis menggunakan data primer dan data skunder. Data primer merupakan literatur dari Afzalur Rahman dalam bukunya "Muhammad Sebagai Seorang Pedagang dan Dotrin Ekonomi Islam" jilid ke-1 yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan data skunder yakni literatur-literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ilmiah ini penulis menggunakan metode deskripsi analitik yaitu mengumpulkan data dan membuat keterangan serta dianalisa, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini. Metode-metode dalam penulisan ini terdiri dari :

- a. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data, keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut. Untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, dengan menganalisa data tersebut sebelumnya.
- b. Deduktif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar tulisan ini lebih terarah dan data dipahami sebagaimana mestinya maka sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

- BAB I** : Dalam bab ini merupakan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Dalam bab ini memaparkan tentang riwayat hidup dari Afzalur Rahman dan karya-karyanya.
- BAB III** : Dalam bab ini berisikan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang upah, pengertian upah, masalah dalam upah, sistem pembayaran

upah, dasar hukum upah, dan pandangan Ekonomi Islam tentang upah.

**BAB IV** : Dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana Upah Tenaga Kerja Menurut perspektif Afzalur Rahman, faktor-faktor terjadinya perbedaan upah menurut Afzalur Rahman.

**BAB V** : Dalam bab ini merupakan penutup dalam penelitian ini yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **BIOGRAFI AFZALUR RAHMAN**

#### **A. Sekilas Tentang Afzalur Rahman**

Afzalur Rahman (1915-1998) yaitu Atlet dan diri berpendidikan sarjana Islam. Ia dididik di Islamia College, Lahore, selama Abdullah Yusuf Ali's jabatannya sebagai kepala sekolah. Afzalur Rahman seorang cendekiawan muslim autodidak asal Pakistan. Dia pendidikan sarjan Islam dan sempat mengenyam pendidikan di Islamia college, Lahore saat lembaga itu masih di kepalai oleh Abdullah Yusuf Ali, penulis The Glorious Qur'an (terjemah dan tafsir Al-Qur'an pertama dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh seorang muslim). Dari Pakistan Afzalur Rahman hijrah ke Inggris, lalu mendirikan The Muslim Educational Trust (MET) pada tahun 1967 dengan dukungan dana Raja Faisal dari Arab Saudi. Met memberikan pelajaran agama Islam kepada murid-murid muslim di sekolah-sekolah Inggris seperti Necoam Hackney School, Bradford, dan lain-lain<sup>10</sup>.

Pada tahun 1976, Afzalur Rahman meninggalkan MET lalu mendirikan The Muslim School Trust ( MST ) yang lebih berfokus pada penerbitan buku-buku Islam. Pada saat inilah terbetik dalam benaknya untuk menerbitkan sebuah ensiklopedia tentang perjalanan hidup Nabi. Maka sepanjang decade 80-an terbitlah 8 volume encyclopedia of seerah Muhammad, sepeninggal Afzalur

---

<sup>10</sup> <http://bukuanakmuslim.blogspot.com/2010/04/ensiklopedimuhamad.htm> tgl. 08 mei 2010



Rahman pada tahun 1998 ditemukanlah volume ke 9 dari encyclopedia tersebut yang belum pernah diterbitkan.

Sepanjang hidupnya Afzalur Rahman sudah puluhan karya yang dihasilkan olehnya. Di antara yang belum pernah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah *Islam: Faith and Prattice, liberty: Readings in Islamic Politikal Philosophy*. Sebagai Ketua Dewan Editor *Encyclopaedia of reesah*, Afzalur Rahman memperkaya ensiklopedianya dengan kontribusi artikel dan kutipan dari banyak ulama dan cendikiawan Muslim level Internasional, baik dari masa lalu maupun masa modern. Di antara ulama zaman klasik yang karyanya dirujuk adalah para penyusun kitab hadist, Ibn Ishaq, Ibn Hisyam, Ibn Sa'ad, Ibn Katsir. Adapun ulama dari masa modern yang dirujuk adalah Muhammad Quthb, Syibli Nu'mani dan lain-lain<sup>11</sup>.

Publik Indonesia sudah mengenal karya-karya Afzalur Rahman, diantaranya Muhammad sebagai Seorang Pedagang yang diterbitkan oleh Yayasan Swarna Bhumy pada 1995. Buku tersebut merupakan buku ketiga pada vol. II *Encyclopaedia of Seerah Muhammad* (jilid 3 dari Ensiklopedi Muhammad Saw.). Karyanya yang lain, *Quranic Sciences*, diterbitkan Mizania pada 2007 dengan judul *Ensiklopediana Ilmu-ilmu dalam Al-Quran*, dan cukup diminati pembaca tanah air. Kalangan akademisi, praktisi, dan peminat ekonomi Islam di Indonesia juga mengenal karya referensialnya, *Doktrin Ekonomi Islam* (4 jilid), terbitan Dana

---

<sup>11</sup> <http://bukuanakmuslim.blogspot.com/2010/08/Doktrin> Ekonomi Islam.htm tgl. 17 Agustus 2010

Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995. Selain itu, Muhammad sebagai Pemimpin Militer (jilid 8 dari Ensiklopedi Muhammad Saw) sempat diterbitkan secara terpisah oleh salah satu penerbit di Indonesia<sup>12</sup>.

Ada 7 Keistimewaan Ensiklopedi Muhammad:

1. Satu-satunya ensiklopedi yang mengupas pribadi Muhammad dari sepuluh aspek dan profesi terpenting manusia dalam hidup: sebagai nabi, pribadi mulia, pedagang, suami dan ayah, pendidik, pecinta ilmu, negarawan, pemimpin militer, pejuang kemanusiaan, dan hakim.
2. Metode penulisan gabungan antara metode kronologis dan tematis. Metode kronologis menyampaikan sejarah hidup nabi secara urutan waktu dari kelahiran nabi, hingga wafat (dijumpai dalam paruh pertama jilid 1). Sedangkan metode tematis adalah metode penulisan yang menyoroti aspek-aspek tertentu dari nabi (dijumpai dalam keseluruhan jilid)<sup>13</sup>.
3. Ditulis oleh cendekiawan terkemuka Pakistan, Afzalurrahman. Beliau dikenal sebagai penulis buku *Muhammad as A Trader - Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* dan *Qur'anic Sciences - Ensiklopedia Ilmu-ilmu dalam Al Qur'an*, yang menjadi buku laris dan diminati pembaca di tanah air. Hampir selama 10 tahun (sepanjang dekade 80-an), Afzalurrahman mencurahkan hidupnya untuk

---

<sup>12</sup> [http : // Anak muslim pintar. Blog spot.com/2009/10/Ensiklopedia Muhammad-baru dari Mizan.html](http://Anakmuslimpintar.blogspot.com/2009/10/Ensiklopedia-Muhammad-baru-dari-Mizan.html). tgl 25 Agustus

<sup>13</sup> *Ibid*

menulis Ensiklopedi ini. Kini publik Indonesia dapat menikmati karya monumental Afzalurrahman dalam versi yang lebih komplit dengan pengemasan yang lebih segar.

4. Merujuk pada kitab-kitab karya ulama klasik: kitab hadis *sittah*, *Sirah* Ibn Ishaq, Ibn Hisyam, Ibn Sa'd, Tabari, dan tafsir *mu'tabarah* (Ibn Katsir, dll.)<sup>14</sup>.
5. Diperkaya dengan kontribusi sekian banyak artikel dan tulisan ulama terkemuka dunia Islam sejak zaman klasik hingga modern seperti Al-Ghazali, Ibn Al-Qayyim, Syah Waliyullah, Abul A'la Maududi, Muhammad Qutb, Sayyid Qutb, Maurice Bucaille, Hasan Al-Nadwi, Muhammad Asad, Hamka, Mustafa Siba'i, Syaikh Abu Zahra, dll.
6. Di sunting dan diperkaya oleh redaksi Pelangi Mizan sehingga menjadi lebih ringkas, padat, informatif, dengan tambahan materi dan ilustrasi visual yang menarik dan artistik. Materi tambahan hasil suntingan redaksi Pelangi Mizan diambil dari berbagai sumber, dalam maupun luar negeri<sup>15</sup>.
7. Rujukan silang ke buku-buku lain dalam program Life Long Learning lainnya seperti *Atlas Dunia Islam*, *Ensiklopedi Islam Modern*, dan *Tafsir Muhammad Asad*.

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

## B. Karya-karya Afzalur Rahman

Adapun karya-karya Afzalur Rahman antara lain :

1. *Economic Dotrines Of Islam* (Doktrin Ekonomi Islam) buku ini terdiri dari empat jilid, jilid pertama menjelaskan prinsi-prinsip sistem ekonomi islam dan menguraikan ke empat faktor produksi dan peranannya dalam sistem ekonomi Islam. Jilid ke dua menjelaskan masalah yang di hadapi dalam menentukan kerja sama dalam beberapa faktor produksi. Jilid ke tiga menjelaskan tentang teori-teori modern tentang bunga dan teori Islam yaitu suku bunga nol persen (*zero rate of interest* ). Dan juga menjelaskan tentang sistem zakat dan hukum harta warisan serta kedudukannya dalam sistem Islam. Jilid ke empat menjelaskan tentang sistem moneter, Bank dengan bebas dan Asuransi tanpa bunga serta standar moneter Internasional<sup>16</sup>.
2. *Muhammad As a Trader* (Muhammad : *encyclopedia of seerac*) Muhammad sebagai seorang pedagang. Buku ini mengupas tentang peran dan aktifitas Muhammad, praktek-praktek perdagangan, etika bisnis soal keadilan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan lebih penting lagi peran Negara dalam kesejahteraan sosial dan distribusi pemakmuran. Republika 30 Agustus 1996, memuat bahwa buku Muhammad sebagai seorang pedagang ini merupakan panduan berdagang bagi umat Islam, buku ini sarat dengan pembahasan

---

<sup>16</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Ahli Bahasa, Soeroyo, Nastagin, (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), Cet. Ke-1, h. 137.

mengenai kehidupan Rasullullah dan posisinya sebagai seorang pedagang besar yang mendasarkan diri pada nilai-nilai **Ilahi**.

Majalah Gatra 02 November 1996, Memuat bahwa buku ini tidak hanya menceritakan praktek seorang pedagang tetapi lebih banyak berbicara mengenai sistem ekonomi Islam. Dengan menonjolkan judul Muhammad sebagai seorang pedagang, akan tercipta citra Islam sebagai agama yang ramah dengan perdagangan dan mengandung ajaran yang membentuk etos kerja serta etika bisnis.

Bisnis Indonesia, minggu III, September 1996. bahwa buku ini patokan berbisnis bagi seluruh umat Islam.

Warta ekonomi, 30 September 1996, memuat bahwa buku ini sangat bermanfaat bagi bangsa kita yang sedang menumbuhkan kelas wirausaha muda yang tangguh di era perdagangan bebas, tidak asal dari pengusaha patron-elien. Juga berguna bagi upaya pengembangan model ekonomi yang berkeadilan.

Majalah Forum, 23 September 1996, memuat bahwa buku "*Muhammad sebagai seorang pedagang*" sarat dengan studi mengenai fikiran berbagai pakar baik barat maupun muslim dan mulai dari ekonomi Keynes sampai Abul A'ala al-Maududi. Satu hal yang selama ini penulis maupun yang membahas etika bisnis seorang muslim dengan pribadi prima, bisnis Indonesia, minggu III, September 1996, bahwa buku ini sebagai patokan berbisnis bagi seluruh umat Islam.

3. Nabi Sebagai Seorang pemimpin Militer, Penerbit Hamzah, Penerjemah Anas Sidik, edisi revisi 1997, buku ini berisikan tentang betapa hebatnya Nabi selain sebagai seorang Rasul ia juga seorang pemimpin militer yang tangguh. Ini sebagai contoh kesempurnaan, keabadian dan keindahan.

Keberhasilan dalam bidang militer sebagai bukti bahwa Islam telah dahulu mengetahui kemiliteran yang dapat diketahui ketika Nabi dikepung di Madinah, Nabi Muhammad menghadapinya dengan keberanian dan meraih kemenangan. Kearifan dan kecakapan Nabi Muhammad sedemikian efektif, dan beliau berhasil menggunakan berbagai faktor dalam strategi perang dan operasi militernya secara umum, sehingga dikagumi oleh generasi pemimpin militer profesional berikutnya. Adapun bukti lain tentang kebesaran Muhammad sebagai seorang pemimpin militer adalah gerakan strategisnya dalam mengejar musuh kecuali kalau mereka berubah pikiran dan kembali ke medan perang<sup>17</sup>.

4. Indek Al-Quran, penerbit Bumi Aksara 1997, terjemahan Drs. Ahsin. buku ini berisikan tentang pengertian kata-kata yang terdapat pada Al-Quran. Yang mana setiap pengertian bahasa yang sulit untuk dipahami atau ada persamaan kata-kata yang disetiap ayat-ayat yang sama, dan dapat diterjemahkan dengan mudah oleh para musafir.

---

<sup>17</sup> Afzalur Rahman, *Nabi Sebagai Seorang Militer*, (Jakarta : Penerbit Amzah, 1997), Cet. Ke-1, h. 87.

5. Ensiklopedia Ilmu dalam Al-Qur'an, penerbit PT. Mizan Pustaka 2007, buku ini lebih dimaksudkan sebagai upaya memperkenalkan kepada generasi muda Muslim khususnya, dan umat manusia pada umumnya tentang khasanah sains yang bersumber dari Al-Qur'an yang telah memberikan pengaruh yang sangat besar pada studi-studi dan kebudayaan Manusia<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Ilmu Dalam Al-Qur'an*, (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2007), Cet. Ke-1. h. 92.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH**

##### **A. Pengertian Upah**

Upah maksudnya adalah imbalan pekerjaan atau prestasi yang wajib dibayar oleh majikan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Jika pekerja diharuskan memenuhi prestasi yaitu melakukan pekerjaan di bawah perintah orang lain yaitu si majikan, maka majikan sebagai pihak pemberi kerja harus memberikan upah. Dan pembayaran upah itu pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang<sup>14</sup>.

Jika setelah si pekerja melakukan pekerjaannya dengan tunduk pada perintah si majikan, dalam rangka kewajibannya seperti yang telah mereka buat didalam perjanjian kerja, maka si pekerja tersebut berhak untuk mendapatkan upah. Upah itulah yang merupakan sarana penting bagi buruh guna melindungi buruh demi kelangsungan hidup beserta keluarganya<sup>15</sup>.

Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan istilah upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

---

<sup>14</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : Rajawali, 1992), Cet. Ke-1, h. 32-33.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 34.



peraturan perundang-undangan, termasuk tujangan bagi perkerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan<sup>16</sup>.

Jenis-jenis upah dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### 1. Upah Nominal

Yang dimaksud dengan upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan atau pun dalam suatu organisasi kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (money wages) sehubungan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.

#### 2. Upah Nyata (Real wages)

Yang dimaksud dengan upah nyata ini ialah upah yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak, upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang banyak tergantung dari besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima, besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Ada kalanya upah itu diterima dalam wujud uang dan fasilitas atau in natura, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas dan barang Innatura tersebut.

---

<sup>16</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindp Persada, 2008) h. 150

### 3. Upah hidup

Dalam hal ini upah yang diterima seorang buruh itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya bagi pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki gizi yang lebih baik.

### 4. Upah Minimum (Minimum wages)

Sebagai mana pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan perburuhan. Bertitik tolak dari hubungan formal ini haruslah tidak dilupakan bahwa seorang buruh adalah seorang manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan, sewajarnya lah kalau buruh itu mendapatkan penghargaan yang wajar dan atau perlindungan yang layak. Dalam hal ini maka upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup buruh itu beserta keluarganya, walupun dalam arti yang serba sederhana<sup>17</sup>.

Adapun tujuan utama penentuan upah minimum yaitu :

- a. Menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh) sebagai sub sistem yang kreatif dalam suatu sistem kerja.
- b. Melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang keadaanya secara material kurang memuaskan.
- c. Mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja.

---

<sup>17</sup> G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1986) h. 93

- d. Mengusahakan terjaminnya ketenangan atau kedamaian dalam organisasi kerja atau perusahaan.
- e. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidupnya secara normal.

#### 5. Upah Wajar (Fair wages)

Upah wajar dimaksudkan sebagai upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruhnya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan buruh kepada pengusaha, sesuai dengan perjanjian kerja di antara mereka. Upah yang wajar ini tentunya sangat bervariasi dan bergerak antara upah minimum dan upah hidup, yang diperkirakan oleh pengusaha cukup untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan buruh dengan keluarganya<sup>18</sup>.

Menurut dewan penelitian batasan tentang pengupahan, upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut sesuatu persetujuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan dan di bayarkan atas dasar suatu Perjanjian Kerja antara Pemberi Kerja dan Penerima Kerja.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 100-102

Jadi dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan secara jelas mengandung maksud yang sama yaitu bahwa upah merupakan pengganti jasa yang telah diserahkan atau dikerahkan oleh seseorang kepada pihak lain.

Adapun upah buruh mempunyai kedudukan yang istimewa, hal ini tertera dalam hal-hal sebagai berikut :

- o Dalam hal pengusaha dinyatakan pailit, maka upah buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepailitan yang berlaku, pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981.
- o Apabila buruh jatuh pailit, maka upah buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak termasuk dalam kepailitan kecuali ditetapkan oleh hakim dengan ketentuan tidak melebihi dari 25% seluruh jumlah upah buruh, pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981<sup>19</sup>.

Unsur-unsur yang mempengaruhi pembayaran upah, menurut pasal 4 peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah disebutkan upah tidak melakukan pekerjaan. Dan didalam pasal 93 Undang-undang Ketenagakerjaan 2003 ada ketentuan juga yaitu " Upah tidak dibayar apabila buruh tidak melakukan pekerjaannya, kecuali apabila buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya sendiri. Hal ini sering disebut asas "No work no pay", namun asas no work no pay (tidak bekerja tidak dibayar) ini tidak berlaku mutlak, artinya walaupun tidak bekerja buruh tetap mendapatkan upah. Asas no work

---

<sup>19</sup> Djumialadji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h. 54.

no pay tidak berlaku dan pengusaha tetap wajib membayar upah, apabila terjadi hal sebagai berikut :

1. Jika buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, pengertian sakit di sini bukan karena kecelakaan kerja. Di samping itu bagi buruh yang sakit tentunya harus ada surat keterangan dokter.
2. Jika buruh tidak masuk kerja karena buruh menikah, menikahkan, mengkhitan, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia..
3. Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang menjalankan kewajiban Negara, menjalankan kewajiban terhadap Negara adalah melaksanakan kewajiban Negara yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pembayaran upah kepada buruh yang menjalankan kewajiban terhadap Negara dilaksanakan apabila:
  - a. Negara tidak melakukan pembayaran.
  - b. Negara membayar kurang dari upah yang biasanya diterima buruh, dalam hal ini pengusaha wajib membayar kekurangannya<sup>20</sup>.

Pembayaran upah oleh pengusaha kepada buruhnya yang menjalankan kewajiban Negara dibatasi paling lama satu tahun. Dengan demikian kalau melebihi dari satu tahun dalam menjalankan kewajiban Negara, asas no work no pay berlaku secara penuh juga.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 56

4. Buruh tidak dapat menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban ibadah menurut agamanya. Sebagai contoh : Departemen agama menentukan waktu untuk melaksanakan ibadah haji adalah 40 hari, maka pengusaha wajib membayar upah buruh untuk selama 40 (empat puluh) hari, selebihnya 40 hari tidak wajib membayar upah.
5. Buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah diperjanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang dialami oleh pengusaha yang seharusnya dapat dihindari.

Dalam hal ini upah yang harus dibayar oleh pengusaha ialah selama buruh tidak dipekerjakan. Untuk halangan yang dialami oleh pengusaha yang tidak dapat dihindari, seperti kehancuran atau musnahnya perusahaan beserta peleralatannya karena bencana alam, kebakaran atau peperangan sehingga perusahaan tidak memungkinkan lagi berfungsi atau menjalankan kegiatannya, maka pengusaha tidak diwajibkan membayar upah kepada buruh.

6. Buruh melaksanakan hak istirahat.
7. Buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan<sup>21</sup>.

## **B. Masalah Dalam Upah**

Didalam kehidupan sehari-hari, kita mengetahui bahwa perselisihan itu merupakan masalah yang umum dalam kehidupan manusia, dalam tiap interaksi

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 45-49.

tentu akan terdapat reaksi. Begitu di perusahaan yang merupakan lingkungan masyarakat pekerja tertentu, hubungan perburuhannya pun tidak terlepas dari pengertian diatas dan suatu kebijaksanaan pengusaha yang telah dipertimbangkan dengan matang, akan diterima oleh para buruhnya dengan rasa puas dan ada pula yang kurang puas<sup>22</sup>.

Jadi masalah timbulnya perselisihan antara pengusaha dengan para buruhnya, berpokok pangkal karena adanya perasaan-perasaan kurang puas tersebut. Pengusaha memberikan kebijaksanaanya yang menurut pertimbangannya sudah mantap dan akan diterima oleh para buruh, sayangnya karena para buruh memiliki perasaan dan pertimbangan yang lain.

Maka penerimaan atas kebijaksanaan pengusaha itupun menjadi tidak sama, sebagian yang merasa puas akan tetap bekerja dengan tenang dan semangat, sedangkan yang merasa kurang puas dengan cepat menunjukan apatisme, semangat kerja menjadi sangat menurun dan terjadilah masalah-masalah itu.

Yang menjadi pokok pangkal kekurangan puasan itu, umumnya berkisar pada masalah-masalah pokok pangkal ketidak puasan buruh dalam hal pengupahan ini seperti :

- a. Lambatnya pelaksanaan pembayaran upah. Biasanya bagi perusahaan yang sudah di akui keabsahannya pelaksanaan upah sudah di jadwalkan.
- b. Adanya pemotongan-pemotongan upah untuk keperluan suatu dana bagi kepentingan buruh, tanpa perundingan dulu dengan pihak buruh.

---

<sup>22</sup> G. Kartasapoetra, R. G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, *op. cit*, h. 245.

- c. Belum mempunya perusahaan untuk memperbaiki upah buruh.
- d. Adanya kehendak dari para buruh agar upahnya dipersamakan dengan pengupahan yang lebih baik di perusahaan lain<sup>23</sup>.

Keberadaan upah minimal ini harus benar-benar dijaga dan diperjuangkan pelaksanaannya, yang tidak hanya didasarkan semata pada mekanisme pasar, mengingat berbagai kelemahan internal buruh untuk memperjuangkan sendiri meski sudah ada kebebasan berserikat. Masalah upah disebut pokok karena dari sekian banyak persoalan perburuhan banyak yang disebabkan persoalan upah<sup>24</sup>.

Setelah mengetahui bahwa yang menjadi pokok dalam soal pengupahan ini, pengusaha harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki apa yang memang kurang baik, sesuai dengan kemampuan perusahaannya, dan apabila perbaikan-perbaikan itu belum mampu mengingat keuangan perusahaan, segera memusyawarahkan hal itu secara terbuka dengan pihak serikat buruh. Dengan cara musyawarah ini lah keinginan dan kemampuan akan dapat didekatkan tanpa adanya perselisihan yang berlaru-larut.

### **C. Sistem Pembayaran Upah**

Menurut hukum positif penetapan upah, terdapat berbagai sistem pembayaran upah, pembayaran itu sebagai berikut :

1. Sistem upah jangka waktu

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 248.

<sup>24</sup> Eggi Sudjana, *Buruh Menggugat Perspektif Islam*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002), Cet. Ke-1, h. 82.



Menurut sistem pembayaran ini, upah ditetapkan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan, dimana tiap-tiap jam diberikan upah perjam, untuk tiap saat hari bekerja diberikan upah harian, untuk seminggu bekerja diberikan upah mingguan, untuk setiap bulan diberikan upah bulanan dan sebagainya. Dalam sistem pengupahan ini, buruh tidak perlu melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa oleh sebab itu dampak negatif dari sistem ini adalah buruh tidak bekerja dengan giat.

## 2. Sistem upah potongan

Sistem ini, sering dipakai untuk mengganti sistem upah jangka waktu apabila hasil pekerjaan tidak memuaskan, karena upah ini hanya bisa diterapkan bila dapat diukur hasil pekerjaan itu dengan ukuran tertentu, misalnya jumlah banyak, jumlah berat, jumlah luasnya hasil pekerjaan buruh tersebut. Maka sistem pengupahan itu tidak dapat dipakai pada suatu perusahaan.

## 3. Sistem upah pemufakatan

Sistem upah ini pada dasarnya adalah upah potongan, yaitu upah untuk hasil pekerjaan tertentu, misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan memuat membongkar dan mengangkut barang-barang dan sebagainya, tapi upah ini bukan diberikan kepada buruh masing-masing melainkan kepada sekumpulan buruh yang telah bersama-sama melakukan pekerjaan itu.

## 4. Sistem skala upah buruh

Adanya pertalian antara upah dengan harga penjualan hasil perusahaan. Cara pengupahan ini dapat dijalankan oleh perusahaan yang harga barang hasilnya

untuk sebagian besar atau seluruhnya tergantung pada harga pasaran di luar negeri, upah akan naik atau turun menurut naik turunnya harga barang hasil perusahaan itu. Cara pengupahan seperti ini banyak terdapat pada perusahaan pertambangan dan pabrik baja di Inggris. Dalam pengupahan ini bisa terjadi perselisihan apabila harga barang turun terus menerus yang akhirnya mengakibatkan buruh yang sudah terbiasa dengan gaji yang besar.

#### 5. Upah indeks

Upah indeks adalah upah yang naik turun, menurut naik turunnya angka indeks biaya penghidupan, tetapi naik turunnya upah ini tidak akan mempengaruhi nilai riil dari upah.

#### 6. Sistem upah pembagian keuntungan

Maksudnya disamping upah yang diterima oleh buruh pada waktu tertentu pada sistem ini, maka pada penutupan buku tahunan bila perusahaan mendapat keuntungan yang besar kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu<sup>25</sup>.

### **D. Dasar Hukum Upah**

Buruh harus memiliki kesadaran bekerja bukan semata-mata merupakan objektivikasi diri manusia untuk mengangkat harga diri dan martabatnya, tetapi juga kesadaran eksistensinya. Kesadaran buruh atas eksistensinya yang kini semakin membuncah harus benar-benar dijaga pertumbuhannya agar mampu

---

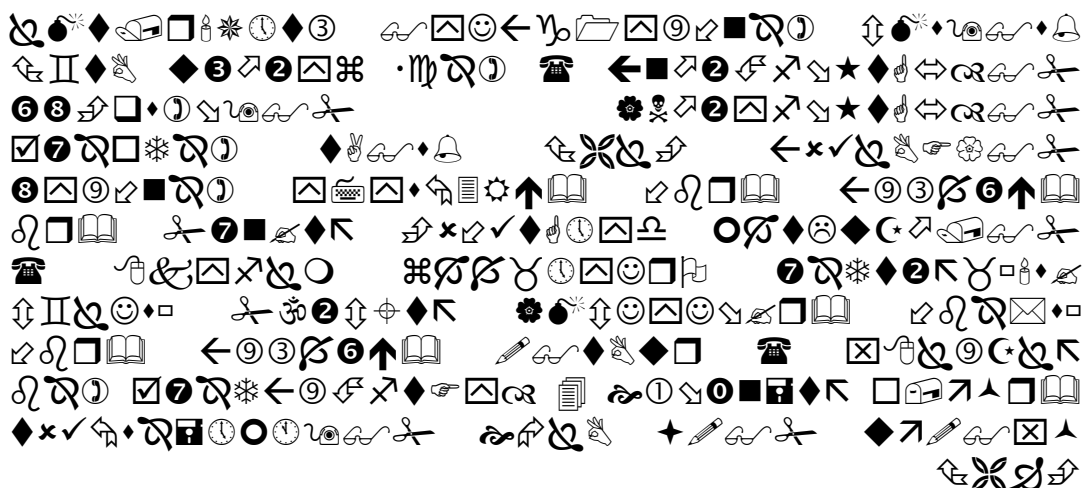
<sup>25</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Djambatan, 1985), Cet. Ke-7, h. 131.

membuahkan hasil berupa kesejahteraan buruh dalam arti lahir dan batin, meskipun kedua-duanya sangat sulit diperoleh sekaligus, barangkali harus benar-benar dikembangkan adalah kesadaran akan persoalan utama buruh yaitu upah agar minimal sama dengan produktivitas yang di hasilkan untuk perusahaan<sup>26</sup>.

Dari uraian diatas bahwa upah (*al-Ijarah*) adalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia, sebab itu para fuqaha telah menilai bahwa ijarah ini suatu hal yang dibolehkan, karena perbuatan tersebut adalah merupakan salah satu bentuk tolong menolong antara sesama manusia.

Dalam syari'at Islam, landasan pengupahan kaum buruh atas jasa yang diberikan kepada majikannya dapat dilihat dalam Al-Qur'an maupun sunah Rasul sebagai berikut :

1. surat al-Qashas ayat 26-27 yang berbunyi :

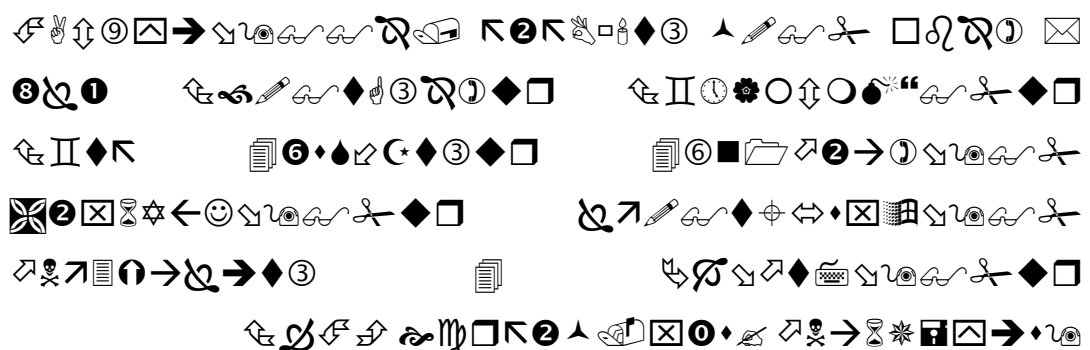


Artinya:

<sup>26</sup> Eggi Sudjana, *op. cit*, h. 81.

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapati ku termasuk orang-orang yang baik".

2. Surat An-Nalh ayat 90 yang berbunyi :



Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran<sup>27</sup>.

3. Hadist Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

Artinya : "berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya (HR.Ibnu Majah) "<sup>28</sup>.

<sup>27</sup> Departemen Agama. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1989), h. 57.

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004)

Maksud hadist diatas berikanlah upah kepada seseorang itu pada waktu berakhirnya pekerjaannya dan jangan menangguhkannya. Dengan adanya dasar hukum yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa upah merupakan sesuatu yang dibolehkan.

Dalam hal upah, memberikan upah hendaknya setelah ada ganti dan yang di upah tidak berkurang nilainya, seperti : Memberi upah kepada yang menyusui, upah ini diberikan karena sebab menyusui tidak karena susunya, tetapi hal mengerjakannya. Sebagaimana orang menyewa rumah dan dalamnya ada sumur, boleh mengambil air sumur dan nilai rumah dengan sumur tidak berkurang. Tidak boleh menyewakan dengan mengurangi nilai yang di sewa, seperti menyewa kebun yang berbuah, menyewa kambing karena susunya atau diambil anaknya sebab yang demikian mengurangi nilainya.

Begitu juga masalah pembayaran upah harus jelas sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga, tetapi sewaktu perijinan boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian kalau ternyata sudah diperjanjikan, maka harus segera diberikan mana kala pekerjaan sudah selesai<sup>29</sup>.

Upah (*Ijarah*) itu berlaku umum atas setiap aqad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil. Pada garis besarnya *ijarah* itu terdiri dari : pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu 'ain (benda),

---

<sup>29</sup> Mohammad . Rifa'I, Mohammad. Zuhri, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1978), h.226.

seperti rumah, pakaian dan lain-lain. Kedua, pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh *nafs* (pekerja), seperti seorang pelayan. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah ini, mestilah orang yang memiliki kecakapan bertindak, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dalam hukum positif juga diatur tentang pengupahan diantaranya, dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi : "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan upah yang harus diterima oleh buruh atau pekerja atas jasa yang diberikan haruslah upah yang wajar<sup>30</sup>.

Disamping itu dalam ketetapan MPR. NO. IV/MPR/1978 disebutkan kebijaksanaan di bidang perlindungan tenaga kerja ditujukan kepada perbaikan upah, syarat-syarat kerja, hubungan kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial dalam rangka perbaikan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh.

### **E. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Upah**

Didalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Sistem ekonomi Islam saat ini lebih dikenal dengan sistem ekonomi syari'ah.

---

<sup>30</sup> Abner Hutabarat, *Kebijaksanaan Upah Minimum*, Direktorat Pengawasan Persyaratan Pengawasan Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial, (Jakarta : 1984), h. 13

Dalam ekonomi islam definisi upah tidak jauh berbeda dengan apa yang disebut diatas, namun dapat kita pandang dari dua segi yaitu moneter dan bukan moneter. Dalam Islam upah (*Al-Ijarah*) adalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia oleh sebab itu para ulama menilai bahwa (*ijarah*) merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan. Syarat mempercepat dan menanggihkan upah menurut mazhab Hanafi boleh, seperti halnya mempercepat upah dan menanggihkan yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Upah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu :

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (*diterima*) oleh kedua belah pihak.
2. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya<sup>31</sup>.

Diantara hak terpenting yang ditetapkan Islam bagi pekerja adalah mendapatkan upah sebagai imbalan pekerjaannya, dimana Islam sangat besar perhatiannya tentang masalah upah kerja ini, seperti yang dapat kita cermati dalam beberapa hal sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Nurul huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan teoritis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 230

1. Ancaman keras bagi orang yang melanggar hak-hak orang lain dan tidak menepati upah mereka. Sungguh Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan kepada para gubernurnya untuk menyampaikan hak kepada orang yang memilikinya, dan melarang dari menghambat hak dari orang yang memilikinya seraya menjelaskan bahwa demikian itu termasuk kezhaliman<sup>32</sup>.
2. Di antara perhatian Islam adalah penentuan upah dan penjelasannya, sehingga tidak lagi terdapat kesamaran dan kerumitan di dalamnya. Dalam hadist disebutkan, "*sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Salam melarang memperkerjakan seseorang sehingga menjelaskan tentang upahnya*"  
 dan di antara yang menunjukkan perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang penjelasan upah dan penentuannya adalah riwayat tentang pemuda miskin yang datang kepada Umar karena ingin jihad, dan dia tidak memiliki dana sama sekali, maka Umar mencarikan untuknya pekerjaan, seraya berkata kepada para sahabat, "Siapakah orang yang memperkerjakan atas namaku pemuda ini untuk bekerja di ladangnya", maka seorang anshar berkata "saya, wahai Amirul Mukminin", Umar berkata, berapa kamu memberinya upah dalam setiap bulan? Ia menjawab, demikian dan demikian. "Umar berkata, Ambillah dia.
3. Diantara bukti perhatian Islam tentang upah pekerja adalah memerintahkan penyerahan upah langsung sehabis selesainya bekerja dari pekerjaannya.

---

<sup>32</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haristi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, (Jakarta : Khalifa, 2006), h. 236-237.



4. Sesungguhnya para pakar hukum Islam (fuqaha) memperhatikan hukum *ijarah* (persewaan)<sup>33</sup>.

Penentuan upah didalam Ekonomi Umar *Radhiyallahhu anhu*, terdapat perbedaan jumlah upah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sesuai kualitas pekerja, dimana seyogianya dibedakan antara para pekerja di pemerintahan dan pekerja terhadap individu, di antaranya adalah para manajer. Berikut rincian tersebut :

#### 1. Para Pekerja di Pemerintahan

Hukum asal dalam upah pekerja di lembaga Negara adalah tidak kurang dari kadar kecukupannya. Sesungguhnya mengatakan keberhakan pekerja pemerintah (pegawai negeri) akan gaji yang tidak kurang dari batas dari kecukupan itu menuntut beberapa faktor, yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi pekerja dari suap atau khianat dengan melanggar terhadap apa yang dibawah kekuasaannya dari harta kaum muslimin.
- b. Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang para guburnya berdagang pada masa tugas mereka.
- c. Meluangkan waktu untuk bekerja.
- d. Penentuan gaji bagi pegawai pemerintah tidak tunduk kepada sistem penawaran.

#### 2. Para Pekerja bagi Individu

Fuqaha membedakan antara pekerja khusus dan pekerja bersama, dimana pekerja khusus adalah orang yang melakukan akad terhadap pekerja pada masa

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 237-238.

tertentu, yang orang mempekerjakan mendapatkan kemanfaatannya selama masa tersebut. Upah pekerjaan seseorang, pekerja bersama atau pekerja khusus berkaitan dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak (pekerja dan yang mempekerjakan).

Sedangkan pengaruh dengan faktor berbandingnya kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar Islam secara penuh, termasuk dalam masalah harga dan upah. Tapi apakah upah pekerja pada individu dipersyaratkan harus merealisasikan hal kecukupannya, upah pekerja pada individu, baik pekerja khusus maupun pekerja bersama tidak dipersyaratkan harus merealisasikan kecukupannya di karenakan sebab-sebab sebagai berikut :

- a. Perbedaan kemampuan dan keahlian seseorang dengan orang yang lain.
- b. Sesungguhnya persyaratan batas minimal upah pekerja pada individu harus tidak kurang dari batas kecukupan itu berdampak pada hal-hal negatif, diantaranya bahwa pekerja akan mengarah pada pekerjaan yang mudah dikarenakan batas kecukupan pasti akan didapatnya.
- c. Pada dasarnya fuqaha ketika membicarakan upah pekerja pada individu, maka sesungguhnya mereka menentukannya dengan upah sepadan<sup>34</sup>.

Dari uraian diatas menunjukan adanya aturan syari'ah dalam bekerja dan menentukan upah, dalam hal ini syari'ah sangat menganjurkan adanya profesionalisme didalam bekerja. Karena segala sesuatu harus di tempatkan pada porsinya dan berdasarkan pada keseriusan atau kesungguhan.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 238-242



**BAB IV**  
**KONSEP UPAH TENAGA KERJA MENURUT PERSPEKTIF**  
**AFZALUR RAHMAN**

**A. Konsep Upah Menurut Afzalur Rahman**

Upah dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Tenaga kerja seperti halnya faktor produksi lainnya, dibayar dengan suatu imbalan atas jasa-jasa yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi<sup>32</sup>.

Menurut prof Benham didalam buku Muhammad sebagai seorang pedagang, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan perjanjian kontrak oleh seorang majikan pada seorang pekerja karena jasa yang telah diberikan<sup>33</sup>.

Pentingnya upah, masalah upah ini merupakan demikian penting dan berpengaruh luas sehingga seluruh masyarakat dapat dipengaruhi olehnya. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup buruh serta keluarganya, bahkan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap seluruh komunitasnya, sebab mereka mengkonsumsi sebagian besar produk nasional.

Selanjutnya jatuhnya daya beli dalam jangka panjang, akan mempengaruhi semua jenis industri yang mensuplai barang-barang kebutuhan

---

<sup>32</sup> Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa, Dewi Nurjulianti dkk, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1997), Cet. Ke-3, h. 296.

<sup>33</sup> *Ibid*, h 296

konsumen pada kelompok-kelompok kerja. Karena perindustrian serta perusahaan lainnya dalam dunia modern sekarang ini saling tergantung, maka jatuhnya permintaan barang-barang kebutuhan konsumen ini akan dirasakan oleh semua industri, terutama bagi para pekerja.

Dengan demikian, secara ekonomi adalah sangat berbahaya bagi suatu Negara jika menghapuskan hak tenaga kerja atas pembagian dividen nasional yang adil. Di samping itu, ketidakadilan terhadap kelompok kerja akan menebarkan ketidakpuasan dan frustrasi diantara mereka, ini bisa jadi akan menyebabkan adanya tindakan-tindakan industrial dalam bentuk pemogokan<sup>34</sup>.

Perselisihan-perselisihan dalam perdagangan dan industri ini menyebabkan kerugian tahunan yang lebih besar, baik kerugian waktu maupun uang bagi para majikan di negara-negara kapitalis dari pada sedikit kenaikan upah yang mereka berikan kepada para pekerja. Karena itu mutlak penting dalam menetapkan upah bagi kelompok-kelompok kerja.

Banyak yang sering kita jumpai bagaimana cara menentukan upah, disini ada perbedaan pendapat dikalangan para pakar ekonomi didalam buku Muhammad sebagai seorang pedagang dalam menghadapi masah upah ini : apa yang seharusnya diperoleh oleh seorang pekerja atau bagaimanakah menentukan upah mereka, beberapa pakar ekonomi sepakat.<sup>35</sup> Banyak teori yang telah dikemukakan oleh berbagai pakar ekonomi, sebagian mengatakan bahwa upah itu ditentukan oleh tingkat mata pencaharian seseorang, sementara sebagian lainnya menekankan produktivitas marginalnya.

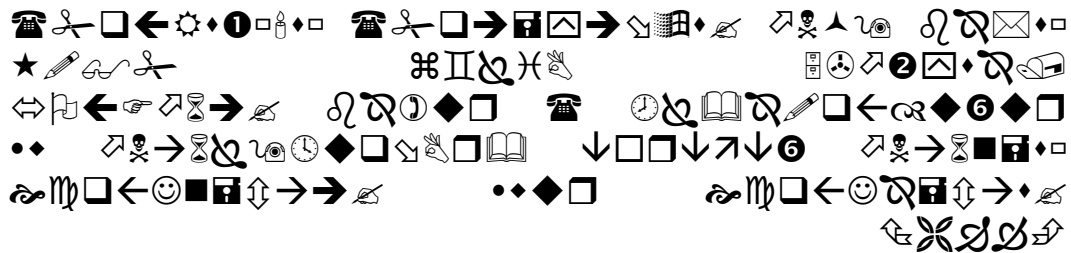
---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 296

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 297.

Didalam pandangan Islam, islam menawarkan solusi yang sangat tepat, baik mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan pekerja maupun majikan. Para buruh mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar hak-hak majikannya yang sah, dan majikan tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan bagian hak pekerja yang sah, sementara para pekerja itu juga tidak diberi seluruh kewenangan, sehingga dapat mengurangi hak yang sah dari majikannya<sup>36</sup>.

Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak tanpa tekanan yang tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya. Prinsip-prinsip persamaan untuk semua ini ditunjukkan dalam surat Al-Baqarah berikut :



Artinya:

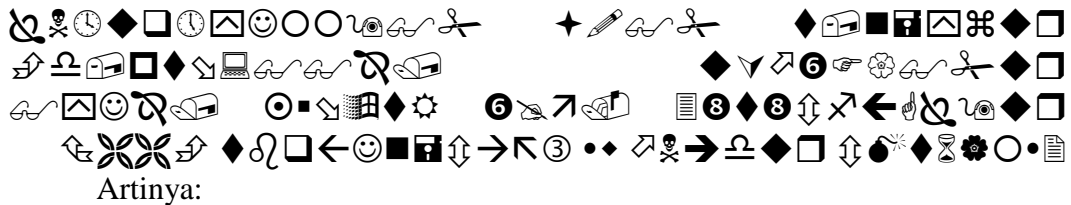
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(2 : 279)<sup>37</sup>.

<sup>36</sup> Ibid, h. 298

<sup>37</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1989), 37.

Kedua belah pihak yang melakukan kontrak perjanjian (upah) dalam konteks ini diperingatkan agar bersikap adil terhadap semua orang dalam bertransaksi, agar tidak merugikan orang lain dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Merugikan para pekerja berarti mereka tidak dibayar dengan suatu bagian yang adil dan sah dari produk bersamanya menurut proporsi kerja mereka. Sedangkan merugikan majikan berarti mereka dipaksa untuk membayar upah para pekerja melebihi yang mereka mampu usahakan. Dengan demikian, Al-Qur'an memerintahkan pada para majikan agar membayar bagian yang menjadi hak pekerja dengan benar sesuai dengan hasil kerja mereka, dan pada saat yang sama melindungi kepentingannya sendiri<sup>38</sup>.

Prinsip yang sama tentang keadilan ditunjukkan dalam surat al-jatsiyah dengan ungkapan sebagai berikut :



Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. (45: 22)<sup>39</sup>.

Prinsip yang mendasar ini mengatur aktivitas manusia dan balasan mereka di dunia dan akhirat kelak: bahwa setiap orang akan mendapat pahala atas apa yang telah mereka hasilkan dan tidak ada satu kerugian yang akan ditimpakan terhadap siapapun. Dengan demikian, prinsip ini menjamin upah yang layak atas

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 296.

<sup>39</sup> Departemen agama RI, *op.cit*, h. 399.

setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah mereka berikan, penyusutan apa pun dalam pendapatannya, tanpa adanya penurunan dalam kontribusinya, dianggap tidak adil dan sah.

Ayat diatas menjelaskan bahwa upah setiap orang haruslah ditetapkan oleh kerja dan kontribusinya terhadap produk bersamanya dan bahwa ia seharusnya dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Prinsip ini juga disebutkan dalam surat al-Ahqaf :



Artinya:

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.(46 : 19)<sup>40</sup>.

Ada pun konsep upah menurut Afzalur Rahman menjelaskan juga :

### 1. Adanya Tingkat Upah

Berdasarkan prinsip-prinsip keadilan itu, dalam masyarakat Muslim upah akan ditentukan melalui negosiasi diantara para pekerja, majikan dan Negara. Kepentingan para pekerja dan majikan akan diperhitungkan dengan adil sampai pada keputusan tentang upah. Tugas negara Islam adalah memastikan bahwa upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikan kebutuhan

---

<sup>40</sup> Ibid, h. 402.



hidup para pekerja, tetapi tidak juga terlalu tinggi sehingga menafikan bagian si majikan dari hasil produk bersamanya.

Untuk membina suatu tingkat upah yang layak dalam suatu Negara, penting sekali ditetapkan tingkat upah minimum dan kebutuhan-kebutuhan yang berubah-ubah dari kelompok pekerja, sehingga dalam keadaan bagaimana pun upah mereka tidak boleh jatuh. Dan tingkat upah minimum ini harus ditinjau kembali sewaktu-waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan perubahan-perubahan dalam tingkat harga serta biaya hidup<sup>41</sup>.

## **2. Tingkat Upah Minimum**

Para pekerja dalam hubungan dengan majikan, berada dalam posisi tawar menawar yang sangat lemah, mengingat posisinya yang lemah itu Islam memberikan perhatian yang besar dalam melindungi hak para pekerja dari segala gangguan yang dilakukan oleh majikannya.

Islam mewajibkan para majikan agar menetapkan upah minimum yang harus dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya. Dengan demikian negara Islam harus menetapkan upah minimum pada suatu tingkat yang membuat mereka mampu memenuhi kebutuhannya, jika kebutuhan mereka tidak cukup dipenuhi dengan upah, maka ini akan sangat mempengaruhi efisiensi didalam melakukan pekerjaan<sup>42</sup>.

Sebagaimana menurut Afzalur Rahman :

---

<sup>41</sup> Afzalur Rahman, *op.cit*, h. 297.

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 298

Sebuah negara Islam harus memperhatikan setiap pekerja di negara tersebut agar memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu taraf hidup yang layak. Dan tidak boleh sama sekali membiarkan tingkat upah jatuh dibawah tingkat minimum, dengan demikian, para buruh mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya<sup>43</sup>.

Seperti halnya Rasulullah selalu menganjurkan kepada sahabatnya agar memberikan upah yang besar kepada pekerjanya. Diriwayatkan bahwa rasul pernah bersabda : "berikanlah makanan dan pakaian pada para pelayan dan budak-budak sesuai dengan kebiasaan yang lazim, dan bebani mereka hanya dengan beban (atau pekerjaan) yang mampu mereka pikul" (Bukhairi). Hadist ini dengan jelas menyatakan upah para pekerja haruslah cukup tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sesuai dengan taraf hidup pada waktu itu<sup>44</sup>.

Dan ini harus dianggap sebagai tingkat upah minimum serta tidak boleh turun lebih rendah lagi didalam sebuah masyarakat muslim. Di sini pendapat Afzalur Rahman senada dengan apa yang rasullullah katakan, dengan kata lain afzalur rahman berpegang dengan prinsip-prinsip yang rasul katakan.

### **3. Tingginya Upah**

Memang benar Islam tidak akan membiarkan upah jatuh dibawah tingkat minimum yang didasarkan pada kebutuhan pokok kelompok para pekerja, namun Islam juga tidak akan membiarkan upah meningkat diatas tingkat yang telah ditentukan oleh kontributor para pekerja pada produksi. Mutlak penting untuk memberikan mereka (para pekerja) paling tidak kebutuhan pokok mereka,

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 297.

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 298

sebagian demi pemerataan dan keadilan dan sebagian lagi untuk mempertahankan standart efisiensi mereka<sup>45</sup>.

Selain itu penting untuk menjaga agar upah senantiasa berada dalam batas-batas yang wajar supaya mereka tidak mengkonsumsi semua yang ia produksi, sebagian karena alasan yang sama menyangkut keadilan, dan sebagian lagi untuk mendorong dan mempertahankan tingkat investasi pada taraf yang wajar. Dengan demikian, diharapkan akan ada suatu batas upah tertinggi.

#### **4. Tingkat Upah Yang Sebenarnya**

Tingkat upah terendah, dimana upah tidak boleh turun lebih rendah lagi, akan melindungi hak-hak pekerja, sedangkan upah tertinggi upah akan menjamin kepentingan para majikan. Upah yang sebenarnya akan berkisar di antara batas-batas tersebut sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang sudah tentu akan dipengaruhi oleh taraf hidup yang biasa dari kelompok pekerja, kekuatan efektif dari organisasi mereka, serta sikap majikan yang mencerminkan keimanan.

Dari hasil interaksi seluruh kekuatan tadi, upah akan ditetapkan antara tingkat minimum dan maksimum yang mengacu pada taraf hidup yang lazim serta kontribusi yang diberikan para pekerja. Upah akan bergerak mendekati tingkat taraf hidup yang lazim dari para pekerja, jika organisasi mereka lemah dan kurang efektif serta keimanan para majikan pada Allah masih diragukan<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 300.

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 3011.

Akan tetapi jika dilain pihak, organisasi para pekerja itu kuat, maka tingkat upah akan bergerak lebih mendekati batas yang paling tinggi dari kontribusi mereka pada produksi. Bagaimanapun juga, negara Islam akan memainkan peranannya didalam menentukan upah pekerja yang wajar dan adil.

Sebagaimana dikatakan Afzalur Rahman :

Jika sewaktu-waktu upah jatuh dibawah tingkat minimum, maka negara Islam mempunyai hak yang sah untuk mencampuri serta menetapkan upah minimum sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pada waktu itu. Akan tetapi jika ajaran Islam dengan semestinya telah diajarkan pada penduduk untuk memperteguh keimanan mereka pada Allah dan hari akhir, maka upah pekerja tidak akan pernah jatuh dibawah tingkat yang dikehendaki dan Negara akan jarang merasa perlu untuk campur tangan. Apabila para majikannya sepenuhnya menyadari kewajiban mereka terhadap pekerjanya, maka akan memberikan upah yang cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka<sup>47</sup>.

## **B. Faktor-faktor Terjadinya Perbedaan Upah Menurut Afzalur Rahman**

Adapun yang menjadi faktor timbulnya perbedaan upah karena adanya :

### **1. Tenaga kerja kasar**

Tenaga kerja kasar disini, para buruh yang tidak mempunyai pendidikan atau keahlian didalam melakukan pekerjaannya, sehingga didalam

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 3012

melakukan pekerjaannya dengan mengandalkan kekuatan tubuh, bukan dengan fikiran<sup>48</sup>.

## 2. Tenaga kerja terdidik (terampil)

Tenaga kerja terdidik disini, parah buruh yang mempunyai pendidikan yang cukup atau keahlian didalam bekerja, sehingga kesungguhan dan kesempurnaan pekerjaan seseorang dengan tenaga fisik dan pikiran, kebijaksanaan akan diberi ganjaran dalam bentuk peningkatan kemakmuran hidup<sup>49</sup>.

Adapun yang membedakan upah dari segi pekerjaan yang di emban di antaranya :

### 1. Upah Pegawai Negeri

Menurut Afzalur Rahman, upah bagi pegawai negeri sering diambil sebagai index upah dari para pekerja umumnya, sesungguhnya upah pegawai negeri berpengaruh besar terhadap tingkat upah umum pada industri-industri lainnya didalam Negeri. Karena pemerintah memperkerjakan sebagian besar pekerja didalam industrinya serta pelayanan sipil dan militer, tingkat upah berpengaruh sangat besar terhadap tingkat upah pasar pada industri-industri swasta. Oleh karena itu mutlak penting bahwa tingkat upah pegawai negeri harus didasarkan dan ditentukan oleh prinsip-prinsip keadilan, dan harus cukup tinggi agar mereka dapat menikmati taraf hidup yang wajar dan agar dapat tetap menjadi pekerja yang jujur dan efisien<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 257

<sup>49</sup> Ibid, h. 261

<sup>50</sup> Afzalur Rahman, *op.cit*, h. 302.

Sebagaimana Rasulullah bersabda : "bagi seorang pegawai negeri, jika ia belum kawin, sebaiknya ia kawin. Jika tidak memiliki seorang pelayan, hendaklah ia memiliki seorang pelayan. Jika tidak memiliki tempat tinggal untuk ditempati, ia boleh membangun sebuah rumah, dan orang yang melampaui batas ini, ia adalah perebut tahta atau pencuri. Dari penjelasan ini memberikan beberapa prinsip dasar untuk menentukan upah pegawai negeri :

1. Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan riil dan praktis para pegawainya.
2. Sikap yang tidak jujur bagi para pegawai jika mereka menuntut pada bendahara negara lebih dari kebutuhan mereka yang sesungguhnya<sup>51</sup>.

Didalam penetapan sistem upah ini harus benar-benar diperhatikan agar perbedaan antara upah yang tertinggi dan terendah tetap berada dalam batas-batas yang wajar, dalam merenkontruksi suatu sistem upah dianjurkan untuk mempertimbangkan beberapa poin berikut :

1. Upah minimum harus cukup tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar para pekerja.
2. Tanggung jawab ekonomi pekerja, termasuk jumlah keluarganya, harus dipertimbangkan dengan tepat
3. Perbedaan-perbedaan dalam upah alami pada sifat pekerjaan, lamanya pengabdian pendidikan dan latihan serta kebutuhan-kebutuhan ekonomi setiap pegawai<sup>52</sup>.

## 2. Gaji Pejabat Tinggi

---

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 304

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 305.

Afzalur Rahman mengemukakan, bahwa gaji para pejabat tinggi termasuk kepala Negara, para gubernur, menteri dan sebagainya, para pejabat ini tidak dibayar dengan upah atau gaji, akan tetapi hanya berupa tunjangan untuk memenuhi biaya-biaya yang mereka perlukan, yang ditentukan menurut taraf rata-rata seorang penduduk biasa di negara Islam<sup>53</sup>.

Rasullullah, dengan ketauladanannya yang unik telah menegakkan prinsip-prinsip yang fundamental dalam masalah tunjangan bagi para pejabat tinggi. Prinsip-prinsip ini dengan tegas dipatuhi oleh para khalifah dan sahabat-sahabatnya, dan Umar telah menetapkan suatu pelayanan umum bagi para pejabat tinggi yang menentukan tunjangan serta taraf hidup mereka.

Penawaran buruh bergantung pada faktor sebagai berikut :

#### a. Kecakapan Tenaga Kerja

Kecakapan tenaga kerja adalah usaha tenaga kerja untuk bekerja pada industri, keahlian dan keterampilan yang dimilikinya yang mampu bersaing yang mana penggunaan alat modern dan elektronik meningkat dengan pesat. Kecakapan buruh sangat penting untuk mencapai kejayaan.

Islam menjunjung tinggi hasil kerja yang cakap, dan memerintahkan umat Islam mengajarkan semua jenis kerja dengan tekun dan sempurna.

Umumnya keahlian seseorang bergantung kepada kesehatan fisik, mental dan moral, pendidikan dan latihan para pekerja<sup>54</sup>.

#### b. Mobilisasi Tenaga Kerja

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 301.

<sup>54</sup> Afzalur Rahman, *op.cit*, h. 262

Mobilitas tenaga kerja ialah gerakan tenaga kerja dari suatu kawasan geografi dan kawasan yang lain. Mobilisasi tenaga kerja mempunyai hubungan yang erat dengan kedudukan ekonomi para pekerja. Jika golongan tenaga kerja boleh bergerak dengan mudah dan bebas dari suatu tempat ke tempat lain, dimana mereka boleh memperoleh upah yang tinggi, sudah pasti taraf hidup mereka akan dapat diperbaiki<sup>55</sup>.

Jadi dari uraian diatas bahwa yang membedakan upah berdasarkan dari pendidikan dan keahlian yang dimiliki, semakin tinggi keahlian yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggilah kedudukan yang akan diterima dan semakin besar pula lah upah yang akan kita terima dari hasil pekerjaan tersebut.

Perbedaan upah juga bisa timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang, beberapa jenis pekerjaan lebih menyenangkan dari pada pekerjaan lainnya. Perbedaan biaya latihan pun sering menyebabkan adanya perbedaan upah, perbedaan upah ini mungkin juga disebabkan oleh ketidaktahuan atau kelambanan. Tetapi dalam beberapa hal, Islam mengakui adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material.

### **C. Analisa**

Upah merupakan sesuatu yang penting dan berpengaruh luas sehingga seluruh masyarakat dapat dipengaruhi olehnya. upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 263



Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup buruh serta keluarganya, bahkan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap seluruh komunitasnya.

Ada empat hal yang perlu dipahami dari pemikiran Afzalur Rahman tentang upah dalam Islam, pertama adanya tingkat upah berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Kedua Islam harus menetapkan upah minimum pada suatu tingkat yang membuat mereka mampu memenuhi kebutuhannya, jika kebutuhan mereka tidak cukup dipenuhi dengan upah, maka ini akan sangat mempengaruhi efisiensi didalam melakukan pekerjaan mereka. Ketiga tingginya upah berdasarkan kebutuhan pokok kelompok para pekerja, tetapi Islam juga tidak akan membiarkan upah meningkat diatas tingkat yang telah ditentukan oleh kontributor para pekerja pada produksi. Keempat Upah yang sebenarnya akan berkisar diantara batas-batas tersebut sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang sudah tentu akan dipengaruhi oleh taraf hidup yang biasa dari kelompok pekerja, kekuatan efektif dari organisasi mereka, serta sikap majikan yang mencerminkan keimanan<sup>56</sup>.

Senada dengan Afzalur Rahman, Muhammad Abdul Manan seorang pakar ekonomi dalam bukunya Ekonomi Teori dan Praktek, mengatakan bahwa didalam kehidupan adanya perbedaan upah. Adanya berbagai faktor yang menjadi sebab terjadinya perbedaan upah ini, terdapat suatu perbedaan upah antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, antara pekerja terampil dan

---

<sup>56</sup> Afzalur Rahman, *op.cit*, h. 297-3011

tidak terampil.<sup>57</sup> Pendekatan Qur'ani dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan salah satu sumbangan terpenting artinya bagi kemajuan peradaban manusia.

Ahmad Ibrahim Abu Sinn juga sependapat dengan Afzalur Rahman, Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang akan diembannya. Jadi upah yang diterima sesuai dengan apa pekerjaan yang dilakukan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pekerja<sup>58</sup>.

Pemikiran Afzalur Rahman menurut penulis khususnya mengenai upah merupakan hal yang terbaik sehingga buruh (pekerja) mendapatkan upah yang adil dan wajar, dengan adanya tingkat upah minimum sehingga kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dan hubungan antara pekerja dengan majikan menjadi harmonis.

Afzalur Rahman dengan jelas mengemukakan, didalam Islam upah buruh sangat diperhatikan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, dan upah ditetapkan tanpa tekanan dari pihak manapun juga, keadilan yang dimaksud kepentingan para pekerja dan majikan akan diperhitungkan dengan adil sampai dengan keputusan upah dapat dilaksanakan.

Penulis sependapat dengan Afzalur Rahman, mengenai sistem upah haruslah berlandaskan keadilan, serta konsep upah buruh yaitu tingkat upah, tingkat upah minimum, tingginya upah, tingkat upah sebenarnya, dan faktor terjadinya perbedaan upah serta yang membedakan upah sesuai pekerjaan yang

---

<sup>57</sup> M. Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, ( Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), h. 117

<sup>58</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah Sebuah Kajian Histori dan kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 113

diembannya. Dari konsep dan faktor tersebut kita dapat mengetahui dengan jelas penetapan upah dan terjadinya perbedaan upah.

Pendapat Afzalur Rahman tentang upah dalam ekonomi islam selaras dengan prinsip Islam yang menghendaki upah yang adil sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Yang tujuan akhirnya agar kebutuhan-kebutuhan buruh terpenuhi pada taraf hidup yang layak serta mencari kesenangan akhirat yang di ridhahi oleh Allah SWT .

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian mengenai upah dalam aktivitas ekonomi menurut Afzalur Rahman, penulis mengambil beberapa intisari sebagai kesimpulan dari uraian penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masalah upah Afzalur Rahman lebih memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keadilan disini antara kedua belah pihak didalam penetapan upah tidak ada tekanan dari pihak manapun demi terwujudnya upah yang adil dan wajar. Ada empat hal yang perlu dipahami dari pemikiran Afzalur Rahman tentang upah dalam Islam, pertama adanya tingkat upah berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Kedua Islam harus menetapkan upah minimum pada suatu tingkat yang membuat mereka mampu memenuhi kebutuhannya, jika kebutuhan mereka tidak cukup dipenuhi dengan upah, maka ini akan sangat mempengaruhi efisiensi didalam melakukan pekerjaan mereka. Ketiga tingginya upah berdasarkan kebutuhan pokok kelompok para pekerja, tetapi Islam juga tidak akan membiarkan upah meningkat diatas tingkat yang telah ditentukan oleh kontributor para pekerja pada produksi. Keempat Upah yang sebenarnya akan berkisar diantara batas-batas tersebut sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang sudah tentu akan dipengaruhi oleh taraf hidup yang biasa dari kelompok pekerja, kekuatan

efektif dari organisasi mereka, serta sikap majikan yang mencerminkan keimanan.

2. Adapun faktor-faktor timbulnya perbedaan upah menurut Afzalur Rahman karena adanya :

- Tenaga kerja kasar
- Tenaga kerja terdidik (terampil)

3. Adapun yang membedakan upah dari segi pekerjaan yang di emban di antaranya :

1. Upah Pegawai Negeri
2. Gaji Pejabat Tinggi
3. Upah buruh

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis meneliti dan membahas pemikiran Afzalur Rahman tentang upah tenaga kerja, penulis ingin memberikan saran kepada setiap pengusaha, pekerja, dan seluruh individu dalam masyarakat baik dalam instansi pemerintah maupun instansi swasta. Pendapat Afzalur Rahman ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan aktifitas pekerjaan, apalagi sangat meneladani sosok Nabi Muhammad SAW sebagai acuan berpendapat.

Sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah SWT sebaiknya kita melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah tidak memakai sistem kapitalis yang menerapkan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara

mengekploitasi orang lain. Dan tidak pula memakai sistem sosialis yang menjajah kemerdekaan individu.

Kemudian bagi para cendikiawan muslim hendaknya dapat meneliti lebih lanjut pendapat-pendapat lain dari Afzalu Rahman agar dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman, ketentuan pendapat tentang teori-teori masa kini. Penulis juga menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya dan sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan juga kritik yang membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Agama Departemen. RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989
- Al-Haristi Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Jakarta : Khalifa, 2006
- Abdurrahman Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Al-Izzah, 2001
- Chapra Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Perss, 2000
- Djumialdji F.X., *Perjanjian Kerja*, Jakarta : Bumi Askara, 1992
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta : CV. Rajawali, 1992
- G. Kartasapoetra, R. G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1986
- Hutabarat Abner, *Kebijaksanaan Upah Minimum*, Direktorat Pengawasan Persyaratan Pengawasan Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial, Jakarta : 1984
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Manan Abdul muhammad, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT Dhana Bhakti Primayasa, 1997
- Mohammad Rifa'I, Mohammad Zuhri, *Terjamah Kifayatul Akhyar*, Semarang : CV. Toha Putra, 1978

Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan teoritis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Rahman Afzalur, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1997

Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995,

Rahman Afzalur, *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Militer*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, Cet. Ke-1

Rahman Afzalur, *Ensiklopedia Ilmu Dalam al-Qur'an*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007, Cet. Ke-4

Sudjana Eggi, *Buruh Menggugat Perspektif Islam*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002

Soepomo Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Djambatan, 1985, Cet. Ke-7

Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2004



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama NENI FITRI YANA, lahir di Bangkinang pada tanggal 22 Februari 1987, merupakan anak ke empat dari lima bersaudara pasangan ayahanda Zukarman (alm) dan Ibunda Nurhayati. Pada tahun 1994 penulis memulai pendidikan dasar di SD Negeri 013 Pulau Bangkinang dan tamat pada tahun 2000.

Kemudian penulis melanjutkan sekolah pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Bangkinang dan tamat pada tahun 2003, selanjutnya pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah ke atas di SMA Negeri 1 Bangkinang dan tamat pada tahun 2006. Pada tahun 2006 penulis diterima pada fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syari'ah, kemudian pada bulan februari sampai maret 2009 melaksanakan Magang di Bank Riau Bangkinang, selanjutnya pada bulan maret sampai mei 2010 melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan judul "Konsep Upah Tenaga Kerja Menurut Perspektif Afzalur Rahman", di bawah bimbingan bapak Aripuddin, MA. Berdasarkan Ujian Sarjana Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU Pada tanggal 09 Agustus 2010 untuk meraih gelar sarjana Ekonomi Islam (SE.I) penulis dinyatakan lulus.

Motto :

Dimana ada kemauan disitu pasti ada jalannya